

DAYA SAING EKONOMI PROVINSI JAMBI

Sudirman¹, Susilawati²

¹Universitas Batanghari, Jambi, Indonesia, sudirmans3@yahoo.com

²Universitas Batanghari, Jambi, Indonesia, susilawatitaz@gmail.com

Abstract

In this study, we want to see the economic basis and pattern of economic structure in Jambi Province, This study uses secondary data, namely Jambi Provisional PDRB and 11 municipal districts in Jambi province in 2010 - 2017 in this study to see the basis of the economy and the mix of economic sectors in Jambi province using the LQ model and the classification typology. The results of this study indicate that from the results of the classic typology analysis, it can be seen that the patterns and structure of economic growth from 9 districts and 2 cities in Jambi Province, West Tanjung Jabung and East Tanjung Jabung districts are classified into Quadrant III declining prosperous regions (potential to be left behind), which means that the rate of growth and income per capita of Tanjung Jabung Barat district is higher than the per capita income of Jambi Province and the growth rate of Tanjung Jabung Barat district is lower than the rate of growth of Jambi Province. Whereas the City of Full Sei is classified into the prospereus quadrant type I area which means that the per capita income of Sei Full City is greater than the income of the Perkapita of Jambi Province and the growth rate of the city of Full Sei is greater than the Growth Rate in Jambi Province.

Keywords : PDRB Jambi Province, City District

PENDAHULUAN

Kuncoro (2002:28). pertumbuhan kawasan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah, yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibandingkan lokasi lainnya dalam suatu provinsi atau kabupaten, memiliki sektor basis dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar. Sjafrizal (2014:88) Suatu daerah akan mengalami percepatan pertumbuhan apabila memiliki potensi sektor ekonomi yang mampu mengakselerasi pembangunan dan sektor-sektor yang lain, dikutip pada Wisnu dan Wijaya (2014). Kemudian disampaikan bahwa untuk itu penentuan potensi sektor ekonomi dalam pembangunan daerah adalah penting dilakukan sebagai upaya pengalokasiansumberdaya yang tersedia dengan tepat.

World Economic Forum (WEF), suatu lembaga yang secara rutin menerbitkan “*Global Competitiveness Report*” mendefinisikan daya saing nasional adalah kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Fokusnya kemudian adalah pada kebijakan-kebijakan yang tepat, institusi-institusi yang sesuai, serta karakteristik-karakteristik ekonomi lain yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan tersebut (Abdullah, 2002).

Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing dilihat dari beberapa indikator yaitu keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif, ada juga keunggulan absolut. Menurut Tarigan (2005:75). Keunggulan komperatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Lebih lanjut menurut tarigan (2005:75) istilah comparative advantage (keunggulan komparatif) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo (1917) sewaktu membahas perdagangan antara dua negara (Tarigan, 2005 dalam Sitorus, 2013).

Konsep daya saing daerah berkembang dari konsep daya saing yang digunakan untuk perusahaan dan negara. Selanjutnya konsep tersebut di kembangkan untuk tingkat negara sebagai daya saing global, khususnya melalui lembaga World Economic Forum (*Global Comvetitiveness Report*) dan International Institute for management Development (*World Competitiveness Yearbook*). Daya saing ekonomi suatu negara seringkali merupakan cerminan dari daya siang ekonomi daerah secara keseluruhan. Disamping itu, dengan adanya tren desentralisasi, maka makin kuat kebutuhan untuk mengetahui daya saing pada tingkat daerah (PPSK BI, 2008).

Michael Porter (1990) menyatakan bahwa konsep daya saing yang dapat diterapkan pada level nasional adalah “produktivitas” yang didefinisikannya sebagai nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. Bank dunia menyatakan hal yang relatif sama di mana “daya saing mengacu kepada besaran serta laju perubahan nilai tambah perunit input yang dicapai oleh perusahaan”. Akan tetapi, baik Bank Dunia, Porter, serta literatur-literatur lain mengenai daya saing nasional memandang bahwa daya saing tidak secara sempit mencakup hanya sebatas tingkat efisiensi suatu perusahaan. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas, tidak berkutat hanya pada level mikro perusahaan, tetapi juga mencakup aspek diluar perusahaan seperti iklim berusaha yang jelas diluar kendali perusahaan.

Menurut Cho (2003), definisi daya saing yang paling populer pada tingkat nasional juga dapat ditemukan dalam Laporan Komisi Kemampuan Bersaing Presiden yang ditulis untuk pemerintahan Reagan pada tahun 1984 yaitu sebagai berikut: “Kemampuan bersaing sebuah negara adalah derajat di mana negara itu dapat, di bawah keadaan pasar yang bebas dan adil, menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi uji pasar internasional sementara secara simultan melakukan perluasan pendapatan riil dari para warga negaranya (Cho, 2003 dalam Millah, 2013:15). Martin

(2003) menyatakan konsep dan definisi daya saing suatu negara atau daerah mencakup beberapa elemen utama sebagai berikut: 1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat; 2. Mampu berkompetisi dengan daerah maupun negara lain; 3. Mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional; 4. Dapat menyediakan lapangan kerja; dan 5. Pembangunan yang berkesinambungan dan tidak membebani generasi yang akan datang.

Huggins (2007) dalam publikasi “UK Competitiveness Index” mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan dari perekonomian untuk menarik dan mempertahankan perusahaan-perusahaan dengan kondisi yang stabil atau dengan pangsa pasar yang meningkat dalam aktivitasnya, dengan tetap mempertahankan atau meningkatkan standar kehidupan bagi semua yang terlibat di dalamnya (Huggins, 2007 dalam PPSK BI, 2008)

Santoso (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Daya Saing Kota-Kota Besar di Indonesia”. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kota melalui penguatan daya saing kota menjadi salah satu strategi kota untuk mampu berkompetisi dengan kota-kota lainnya. Penentuan peringkat dan pemetaan daya saing kota akan membantu kota-kota besar dalam menentukan arah pembangunannya ke depan. Kota-kota dapat secara obyektif mengetahui kekuatan dan kelemahannya baik berdasarkan indikator input maupun outputnya. Karena peringkat daya saing yang disusun bersifat dinamis, maka kota-kota harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan posisinya secara terus menerus.

Hidayat (2012) Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa dari hasil pembobotan dan pemeringkatan diperoleh tiga faktor utama penentu daya saing ekonomi kota medan, yaitu faktor infrastruktur dengan nilai bobot tertinggi. Skala prioritas untuk faktor infrastruktur yang harus diperhatikan adalah ketersediaan energi alternatif dan kualitas infrastruktur fisik, sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha yang terjadi di daerah. Selanjutnya diikuti oleh skala prioritas faktor ekonomi daerah yang merupakan indikasi dari potensi ekonomi dan struktur ekonomi suatu daerah yang merupakan pertimbangan penting dalam mendukung daya saing ekonomi daerah. Diikuti, faktor sistem keuangan, adapun Universitas Sumatera Utara 22 variabel yang menjadi penentu daya saing ekonomi untuk faktor sistem keuangan adalah variabel kinerja lembaga keuangan, variabel infrastruktur perbankan dan infrastruktur non perbankan. Keberadaan lembaga keuangan di suatu daerah baik lembaga perbankan maupun non perbankan diyakini mampu mempercepat proses pembangunan dan kemajuan ekonomi. Faktor berikutnya adalah faktor kelembagaan yang menjadi skala prioritas untuk diperhatikan adalah kepastian hukum melalui konsistensi peraturan dan penegakkan hukum yang masih dirasakan distorsif. Sedangkan faktor sosial politik yang menjadi prioritas utama adalah tingkat keamanan guna menjamin kelangsungan berusaha dan gangguan dari masyarakat disekitar tempat kegiatan usaha dilakukan.

Soebagyo, dkk (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Regional Competitiveness and Its Implications for Development”. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa Daya saing daerah menjadi salah satu isu dalam pembangunan daerah semenjak diberlakukan kebijakan otonomi daerah. Pengukuran daya saing daerah selama ini banyak dilakukan melalui pemeringkatan sebagai benchmark daya saing daerah. Pemetaan daya saing daerah di Indonesia telah dilakukan terhadap semua kabupaten dan kota, yang menunjukkan peringkat daya saing masing-masing daerah. Peringkat daya saing daerah dinilai berdasarkan karakteristik daya saing input dan daya saing outputnya.

Huda dan Eko (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur berdasarkan Potensi Daerahnya”. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kemampuan daya saing antara wilayah perkotaan dan kabupaten. Terdapat 17 kabupaten yang masuk dalam kategori kemampuan daya saing rendah. Dari hasil pemetaan, menunjukkan bahwa daerah yang memiliki daya saing tinggi secara umum didominasi oleh daerah yang unggul di indikator Perekonomian dan Keuangan Daerah serta Lingkungan Usaha Produktif.

Ira Irawati, dkk (2012) yang berjudul “Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur, dan Sumber Daya Alam, serta Variabel Sumber Daya Manusia di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara” di jelaskan bahwa daya saing wilayah menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Dalam Pengembangan wilayah di kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing tersebut, walaupun dalam pengembangannya menghadapi permasalahan-permasalahan yang antara lain disebabkan oleh kurang berkembangnya sumber daya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kualitas hidup Universitas Sumatera Utara 23 masyarakat serta kurangnya prasarana dan sarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN



Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa metode analisis yaitu:

Analisis Tipologi Klassen

Potensi perekonomian daerah dapat dilihat dari sisi pertumbuhan ekonominya dan kontribusi sektoral terhadap PDRBnya. Pemetaan potensi perekonomian di tujuh belas sektor lapangan usaha akan sangat bermanfaat bagi daerah untuk membuat prioritas kebijakan. Untuk menentukan prioritas kebijakan ini, khususnya kebijakan pembangunan ekonomi, diperlukan

analisis ekonomi (struktur ekonomi) daerah secara menyeluruh. Salah satu analisis ekonomi tersebut adalah menggunakan tipologi klassen. Analisis Tipologi Klassen bermanfaat untuk mengidentifikasi peta potensi ekonomi secara makro. Melalui Analisis Tipologi Klassen, potensi daerah secara sektoral yang didasarkan pada data PDRB bisa dipetakan. Analisis Tipologi Klassen mengelompokkan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan (g) dan kontribusi sektor (s) tertentu terhadap total PDRB suatu daerah. Dengan menggunakan Analisis Tipologi Klassen, masing-masing sektor dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu:

Tabel 1
Matriks Kategori Sektor berdasarkan Tipologi Klassen

Kontribusi Sektor	$Y_{SEKTORAL} \geq Y_{PDRB}$	$Y_{SEKTORAL} < Y_{PDRB}$
$r_{SEKTORAL} \geq r_{PDRB}$	<p>Kuadran I</p>  <p>SEKTOR UNGGULAN</p>	<p>Kuadran II</p>  <p>SEKTOR BERKEMBANG</p>
$r_{SEKTORAL} < r_{PDRB}$	<p>Kuadran III</p> <hr/> <p>SEKTOR POTENSIAL</p>	<p>Kuadran IV</p> <hr/> <p>SEKTOR TERBELAKANG</p>

Analisis Location Quotient (LQ)

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim digunakan adalah *location quotient* (LQ). Teknik LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan (*leading sectors*). Dalam teknik LQ berbagai peubah (faktor) dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah misalnya kesempatan kerja (tenaga kerja) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Untuk mendapatkan nilai LQ menggunakan metode yang mengacu pada formula yang dikemukakan oleh Bendavid-Val dalam Kuncoro (2004) sebagai berikut:

$$LQ = \frac{V_1^R / V^R}{V_1 / V}$$

V_1^R = Nilai PDRB suatu sektor kabupaten/kota

- VR = Nilai PDRB seluruh sektor kabupaten/kota
VI = Nilai PDRB suatu sektor tingkat Provinsi
V = Nilai PDRB seluruh sektor tingkat Provinsi.

Kriteria penilaian LQ:

ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

Pola Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi

Untuk menentukan pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat digunakan metode Tipologi Klassen. Tipologi Klassen membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal. Daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu :

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (High growth and high income) adalah laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita rata-rata provinsi.
2. Daerah maju tapi tertekan. (high income but low growth) yaitu daerah yang relatif maju, tapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhan menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Daerah ini merupakan daerah yang telah maju tapi di masa mendatang pertumbuhannya tidak akan begitu cepat walaupun potensi pengembangan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar. Daerah ini mempunyai pendapatan perkapita lebih tinggi tapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi.
3. Daerah berkembang cepat (high growth but low income) adalah daerah yang dapat berkembang cepat dengan potensi pengembangan yang dimiliki sangat besar tapi belum diolah sepenuhnya secara baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi, namun tingkat pendapatan perkapita yang mencerminkan dari tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah. Daerah ini memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi.
4. Daerah relatif tertinggal (low growth and low income) adalah daerah yang masih mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita lebih rendah dari pada rata-rata provinsi

Dari hasil analisis tipologi klassen ini terlihat bahwa pola dan struktur pertumbuhan ekonomi dari 9 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Jambi, kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur diklasifikasikan ke dalam Kuadran III daerah makmur yang sedang menurun (potensial untuk tertinggal), yang memberikan arti bahwa tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan perkapita

Provinsi Jambi dan laju pertumbuhan kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan Provinsi Jambi.

Sedangkan Kota Sei Penuh diklasifikasikan kedalam Kuadran tipe I daerah Makmur yang berarti bahwa pendapatan perkapita Kota Sei Penuh lebih besar dari pendapatan Perkapita Provinsi Jambi dan Laju pertumbuhan kota Sei Penuh lebih besar dari pada Laju Pertumbuhan di Provinsi Jambi.

Hasil Analisis Tipologi Klassen
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Tahun	Rata-Rata PDRB PERKAPITA			Rata-Rata Laju Pertumbuhan			Status
	Provinsi Jambi	Kab/Kota	Kategori	Provinsi Jambi	Kab Kota	Kategori	
Kerinci	41152.63	25828.13	Rendah (-)	6.37	6.69	Tinggi (+)	Tipe II
Merangin		25828.25	Rendah (-)		6.51	Tinggi (+)	Tipe II
Sarolangun		36497.75	Rendah (-)		6.28	Tinggi (+)	Tipe II
Batanghari		41075.38	Rendah (-)		6.63	Tinggi (+)	Tipe II
Muaro Jambi		38089.25	Rendah (-)		6,5	Tinggi (+)	Tipe II
Tanjabtim		804071.5	Tinggi (+)		4,2	Rendah (-)	Tipe III
Tanjabbarat		89743.38	Tinggi (+)		5,3	Rendah (-)	Tipe III
Tebo		27709.88	Rendah (-)		6,6	Tinggi (+)	Tipe II
Bungo		33652.5	Rendah (-)		6,9	Tinggi (+)	Tipe II
Kota Jambi		2572.71	Rendah (-)		6,9	Tinggi (+)	Tipe II
Kota Sungai Penuh		49342.25	Tinggi (+)		7,00	Tinggi (+)	Tipe I

Sektor Ekonomi Potensial di Sungai Penuh

Berdasarkan hasil analisis tipologi Klassen, dari 9 kabupaten dan 2 kota Kota Sungai Penuh memiliki klasifikasi Tipe I yakni kategori daerah Makmur. Untuk mengetahui sektor potensial di suatu daerah, alat analisis yang digunakan adalah dengan melihat nilai Location Quotients (LQ), yang merupakan perbandingan kontribusi masing – masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kota Sungai Penuh dengan PDRB Provinsi Jambi. Jika nilai $LQ > 1$, maka sektor tersebut dapat dikatakan sektor potensial (basis). Apabila nilai $LQ < 1$ maka sektor tersebut bukan merupakan sektor potensial (non basis).

Berdasarkan hasil analisis LQ pada tabel dapat terlihat bahwasanya dari 17 sektor, 11 sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$, dari 11 sektor yang paling besar nilai LQ nya adalah Sektor Keuangan dan Asuransi dengan Nilai $LQ > 4$. Ini berarti bahwa sektor keuangan dan asuransi memiliki kontribusi besar dalam menyumbang PDRB di Kota Sungai Penuh.

Adapun hasil penelitian LQ Kota Sungai Penuh pada periode 2010-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Analisis LQ Kota Sungai Penuh
Periode 2010-2017

Sektor PDRB	LQ 2010	LQ 2011	LQ 2012	LQ 2013	LQ 2014	LQ 2015	LQ 2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.126458	0.125684	0.260726	0.119896	0.11461	0.110521	0.11233
B. Pertambangan dan Penggalian	0.640487	0.625205	0.032719	0.591468	0.595346	0.580156	0.579197
C. Industri Pengolahan	0.297093	0.256082	0.067283	0.238359	0.245632	0.24154	0.251352
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.755798	0.803875	0.538891	0.846769	0.868906	0.806189	0.708029
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.961638	1.020131	2.869515	0.995141	0.992582	0.978218	1.000509
F. Konstruksi	1.892922	2.022269	2.093946	2.204471	2.190168	2.229972	2.304036
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.648361	2.406641	2.757015	2.440932	2.597095	2.598443	2.400633
H. Transportasi dan Pergudangan	1.516622	1.604099	1.282591	1.619501	1.598953	1.628669	1.649541
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.304666	1.302272	1.141198	1.202618	1.219312	1.314753	1.326562
J. Informasi dan Komunikasi	2.329539	2.427551	4.224381	2.33089	2.5189	2.465597	2.353392
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.942343	4.628774	2.281255	4.927718	4.821063	4.771314	4.934097
L. Real Estate	1.526964	1.595087	2.098968	1.635834	1.724526	1.638423	1.609565
M.N. Jasa Perusahaan	135.1223	141.5304	5.900231	135.5912	132.9759	128.5686	130.3603
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.907454	0.952042	1.740839	0.981253	0.924309	0.82522	0.832073
P. Jasa Pendidikan	2.037727	2.15005	2.960917	2.094448	2.226449	2.246569	2.262803
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.59465	1.738121	2.476619	1.750211	1.818375	1.88718	1.88596
R.S.T.U. Jasa lainnya	1.53435	1.648996	2.542	1.681279	1.749183	1.69634	1.674571
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.419965	9.813959	2.074653	9.485409	9.363608	9.093396	9.19088

Sumber: (Data diolah), 2019

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Tipologi Klasen pola pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh diklasifikasikan kedalam Kuadran tipe I daerah Makmur yang berarti bahwa pendapatan perkapita Kota Sei Penuh lebih besar dari pendapatan Perkapita Provinsi Jambi dan Laju pertumbuhan kota Sei Penuh lebih besar dari pada Laju Pertumbuhan di Provinsi Jambi. Dari 17 sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan di kota sungai penuh adalah sektor Keuangan dan Asuransi dengan nilai LQ yang lebih dari 1 yakni dengan rata-rata 4,47 yang berarti dapat dikatakan bahwasanya sektor Keuangan dan Asuransi merupakan sektor unggulan atau sektor potensial di Kota Sungai Penuh.

REFERENSI

Cho, Dhong shung, (2002) “Evolusi Teori Daya Saing” Salemba Empat Johar baru Jakarta Pusat cet pertama

- Huda dan Eko (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur berdasarkan Potensi Daerahnya”.
- Hidayat (2012) yang berjudul “Analisis Daya Saing Ekonomi Kota Medan”.
- Irawati,dkk (2012) yang berjudul “Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastuktur, dan Sumber Daya Alam, serta Variabel Sumber Daya Manusia di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara”.
- Kuncoro, Mudrajad (2002), “ *Perencanaan Pembangunan Daerah*” Erlangga edisi ke 4
Yogyakarta, 2002
- Sfraizal (2008), “ Ekonom Regional: Teori dan aplikasi “ Baduose Media cet.pertama
I S B N : 978 - 979 - 17475 - 2 – 3
- Soebagyo, dkk (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Regional Competitiveness and Its Implications for Development”.
- Santoso (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Daya Saing Kota-Kota Besar di Indonesia”
- Michael Porter (1990), “ Teori Perdagangan Internasional” Salemba empat Jakarta
- Tarigan,Robinson (2005:75). Ekonomi Reginal “ Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Bumi Aksara